

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN/IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pejabat pemerintah pada kantor, badan, dan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul yang meliputi tingkat kepala baik kepala kantor/badan/dinas, sekretariat/sekretaris, kepala bidang/bagian, dan kepala subbidang/subbagian/seksi. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H_1) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) terdukung. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern dalam pemerintahan maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah tersebut.
2. Hasil pengujian hipotesis yang kedua (H_2) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) terdukung.

3. Artinya, semakin taatnya pejabat pada pearturan perundangan maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah tersebut.
4. Hasil pengujian hipotesis yang ketiga (H_3) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) terdukung. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern yang terdapat dalam pemerintahan dan didorong dengan semakin tingginya komitmen aparat terhadap organisasinya maka kinerja dari pemerintah daerah tersebut akan meningkat.
5. Hasil pengujian hipotesis yang keempat (H_4) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) terdukung. Artinya, semakin taatnya pejabat pada peraturan perundangan dan didorong dengan komitmen yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah tersebut.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini hanya sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan masih banyak faktor-faktor lain di luar model penelitian yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul yang terdiri dari kantor, badan, maupun dinas sehingga hasil yang diperoleh tingkat generalisasinya rendah.
3. Pengumpulan data penelitian hanya menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara sehingga hasil penelitian belum menunjukkan secara detail mengenai kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan kuesioner dapat menghasilkan jawaban yang bias dari responden karena ketidakseriusan responden dalam menjawab pernyataan.

C. Implikasi Kebijakan

Implikasi Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dalam meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan

perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa seluruh hipotesis terdukung sehingga menunjukkan sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, komitmen organisasi juga mampu memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Implikasi Praktis: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran serta dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan berdasarkan sistem pengendalian intern, ketaatan peraturan perundangan, serta diperkuat dengan komitmen organisasi yang berperan sebagai variabel moderasi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya untuk melakukan kajian atas fenomena tersebut dalam upaya untuk membangun pemerintahan yang optimal dengan memperhatikan sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan serta komitmen organisasi.

D. Saran

Berkaitan dengan simpulan, keterbatasan, dan implikasi kebijakan yang terdapat dalam penelitian maka saran yang dapat diberikan guna perbaikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel independen lain yang merupakan faktor-faktor penentu hasil capaian kinerja dari pemerintah daerah serta melibatkan variabel moderasi atau intervening sehingga dapat membandingkan pengaruh mana yang lebih besar.
2. Memperluas penelitian tidak hanya satu kabupaten saja melainkan beberapa kabupaten atau lingkup provinsi agar data yang didapatkan banyak sehingga bisa lebih memperkuat hasil penelitian serta dapat meningkatkan generalisasi kesimpulan hasil penelitian.
3. Selain melakukan pengisian kuesioner, sebaiknya juga melakukan wawancara secara langsung terhadap responden pada saat penyebaran kuesioner sehingga informasi dan data yang didapatkan lebih akurat serta penelitian akan menunjukkan hasil secara detail mengenai kinerja pemerintah daerah.